



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Konsep Negara dan Politik Kebangsaan Soekarno

**Adrian Ichsan Pratama<sup>1</sup>, Beni Ahmad Saebani<sup>2</sup>, N Nasrudin<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, [adrianichsan23@gmail.com](mailto:adrianichsan23@gmail.com)

<sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, [beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id](mailto:beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id)

<sup>3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, [anazhaitami@uinsgd.ac.id](mailto:anazhaitami@uinsgd.ac.id)

Corresponding Author: [adrianichsan23@gmail.com](mailto:adrianichsan23@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study discusses the concept of Soekarno's state and national politics. This study is motivated by the diversity of Indonesian society which is multi-ethnic and pluralistic. It requires basic state norms as a basis for unity in the state. This study aims to determine the concept of the state according to Soekarno and to determine Soekarno's national politics which are the characteristics of political thought in formulating the foundation of the Indonesian state. This research is methodologically a study of the thoughts of figures who have the virtue of thinking as a leader of the state, therefore using a philosophical approach in terms of the essence of their thoughts, the source of thought, and the purpose of their thoughts. Soekarno's thinking about the concept of state and national politics became the embryo of the birth of the formulation of the Pancasila philosophy. The concept of the state and national politics of Soekarno is by the theory of state sovereignty initiated by John Locke, that state power is in the hands of the people, but constitutionally power cannot be handled authoritarily, power must be separated, and there is a division of power so that the administration of the state is more effective and efficient. In the context of the theory of state sovereignty, Soekarno's national political thought emphasized that sovereignty must be used by the state as much as possible for the prosperity of the people.*

**Keyword:** *state, nationality, sovereignty*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas mengenai konsep negara dan politik kebangsaan Soekarno. Penelitian ini dilatarbelakangi karena kemajemukan masyarakat Indonesia yang multi etnis dan pluralis sehingga membutuhkan norma dasar negara sebagai landasan persatuan dalam bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep negara menurut Soekarno dan untuk mengetahui politik kebangsaan Soekarno yang menjadi corak pemikiran politik dalam perumusan dasar negara Indonesia. Penelitian ini secara metodologis merupakan penelitian tentang pemikiran tokoh yang memiliki keutamaan berpikir sebagai pemimpin negara, oleh karena itu menggunakan pendekatan filosofis dari segi hakikat pemikirannya, sumber pemikiran, dan tujuan dari pemikirannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemikiran Soekarno tentang konsep negara dan politik kebangsaan menjadi embrio lahirnya rumusan falsafah Pancasila. Konsep negara dan politik kebangsaan

Soekarno sudah sesuai dengan teori kedaulatan negara yang dicetuskan oleh John Locke, bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat, namun secara konstitusional kekuasaan tidak dapat ditangani secara otoritarian, kekuasaan harus dipisahkan dan atau berlaku adanya pembagian kekuasaan supaya penyelenggaraan negara lebih efektif dan efisien. Dalam konteks teori kedaulatan negara pemikiran politik kebangsaan Soekarno menegaskan bahwa kedaulatan harus digunakan negara dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

**Kata Kunci:** *Negara, Kebangsaan, Kedaulatan.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, kelompok, dan agama yang berbeda-beda. Masyarakat Majemuk secara sadar mengetahui akan keberagaman masyarakat yang berbeda dalam latar belakang adat istiadat budaya, dan kepentingan. Menurut Furnival sebagaimana yang dikutip oleh Nasikun bahwa masyarakat majemuk (*plural societies*) adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua elemen yang tumbuh masing-masing tanpa ada penyatuan satu dengan yang lainnya didalam suatu kesatuan politik (Nasikun, 1984). Dalam hal ini Indonesia memiliki hal tersebut, hal ini ditambahkan oleh Nasikun bahwa kemajemukan tersebut terjadi karena keadaan geografis dengan letak pulau yang sangat banyak, serta Indonesia pula terletak diantara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik yang menyebabkan mempengaruhi terjadinya pluralitas beragama (Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, 1984). karena kemajemukannya tersebut Indonesia memerlukan norma dasar (*grundnorm*) yang dapat dijadikan sebagai pedoman didalam bernegara dan menjamin segala bentuk kemajemukan yang ada menjadi suatu persatuan yang harus dihayati. Norma dasar negara Indonesia adalah Pancasila, Pancasila sebagai norma dasar negara sudah seharusnya merepresentasikan persatuan bangsa. Pancasila selain mengatur dalam kegiatan bernegara, juga mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia terutama didalam pelaksanaannya harus selaras dengan norma dasar Pancasila (Hasanah & Budianto, 2020). Soekarno merupakan salah satu dari ketiga *Founding Father* perumusan Pancasila, Salah satu tokoh pergerakan dan kemerdekaan yang memperjuangkan hak merdeka bagi bangsa Indonesia.

Soekarno merupakan tokoh nasionalis yang memerjuangkan masyarakat yang tertindas dari kejamnya kolonialisme dan imperialisme Belanda. Salah satu bentuk kepedulian dan nasionalisme Soekarno pada masyarakat Indonesia kala itu dengan memerjuangkan kaum petani yang tertindas sehingga timbul pemikiran Soekarno yang disebut faham *marhaenisme* (Raenady & Dewantara, 2021). Selain itu, pergerakannya menumbuhkan semangat nasionalisme bangsa, Soekarno menyuarakan tentang demokrasi terpimpin yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong dengan tuntunan dan pengawasan seorang pemimpin. Pada perumusan Pancasila Soekarno memberikan pemikiran politiknya pada lima rumusan dasar negara yang disampaikan dipidatonya pada 1 Juni 1945 diantaranya yaitu; 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan, 3) Mufakat atau Demokrasi, 4) Kesejahteraan Sosial, 5) Ketuhanan (Rahardjo & Syamsuhadi, 1994). Melalui dasar rumusan pancasila ini Soekarno menekankan bahwa bangsa merupakan syarat utama dan unsur penting pada berdirinya sebuah negara, dasar rumusan pemikiran Soekarno tentang kebangsaan menegaskan tentang pentingnya persatuan dan kesetaraan setiap golongan

Dengan rumusan pemikirannya pada perumusan Pancasila, Soekarno berusaha menyatukan berbagai macam golongan-golongan yang ada di Indonesia diantaranya nasionalis, agamis dan komunis atau yang dikenal dengan sebutan (NASAKOM). Persatuan dan kesatuan menjadi cita-cita yang diinginkan Soekarno sebagai api semangat nasionalisme bangsa didalam berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme. Nasionalisme sebagai

semangat pemersatu dari masyarakat Indonesia yang beragam, nasionalisme dianggap oleh Soekarno sebagai kekuatan pengikat dalam kemajemukan bangsa Indonesia dengan perbedaan suku, ras, golongan, agama, dan budaya, sehingga nasionalisme dapat membangun identitas kebangsaan yang harmonis. Dalam perumusan Pancasila Soekarno berusaha mengesampingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok, suku, ras, ataupun untuk tokoh tertentu. Dengan demikian, konsep negara dan politik kebangsaan dari pemikiran Soekarno amat menarik untuk dikaji, dikarenakan ada yang berpandangan bahwa keinginan Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin adalah sebagai upaya dirinya yang ingin menjadi presiden seumur hidup.

Untuk bahan acuan dalam penelitian ini perlu adanya kajian terhadap penelitian terdahulu, diantaranya: 1) Ajat Sudrajat (2007) yang berjudul “Konsep Dasar Negara (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Soekarno)”;

2) Intan Virgina Z.M (2021) yang berjudul “Dimensi Sosialisme Religius dalam Pemikiran Politik Ir. Soekarno Tahun (1959-1966 M)”;

dan 3) Sri Puji Wahyuni (2014) yang berjudul “Pemikiran Ir. Soekarno Tentang Demokrasi”. Dari ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu membahas terkait corak pemikiran Soekarno sebelum kemerdekaan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang konsep negara menurut Soekarno dan politik kebangsaan menurut Soekarno dengan dilihat dari perspektif teori kedaulatan Negara.

## **METODE**

Penelitian ini mendeskripsikan tentang Konsep Negara Soekarno dan politik Kebangsaan yang akan dianalisis menggunakan teori kekuasaan negara dan teori kedaulatan negara. Secara metodologis penelitian ini merupakan penelitian tentang pemikiran untuk memahami makna ontologis, epistemologis, dan aksiologinya pemikiran Soekarno sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis. Data primer yang dikaji adalah pemikiran Soekarno dari buku “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat” Sedangkan data sekunder merupakan data tambahan atau data pendukung yang diperoleh peneliti melalui sumber-sumber yang berisi data keilmuan baik buku-buku, hasil penelitian ilmiah, dan artikel yang dipublikasikan yang menganalisis pemikiran Soekarno

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *1. Riwayat Hidup Soekarno*

Soekarno merupakan tokoh proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Namanya masyhur di kalangan masyarakat Indonesia bahkan di dunia. Soekarno dilahirkan pada Kamis 6 Juni 1901 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1331 Hijriah dan dalam penanggalan Jawa Soekarno dilahirkan pada Kamis Pon di Desa Lawang Sekaten Kota Surabaya. Soekarno merupakan seorang yang lahir dan dibesarkan di tengah keluarga yang mempercayai kebiasaan adat Jawa yang gemar dengan kisah pewayangan (Adams, 1984). Ayah Soekarno bernama Raden Soekeni Sosrodihardjo yang merupakan keturunan Jawa berkelas Priyayi, dilahirkan pada tahun 1869 dan memperoleh pendidikan keguruan di Probolinggo, Raden Soekeni memiliki campuran pemikiran barat, Islam, dan memiliki faham teosofi yaitu keyakinan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kelebihan. Hal tersebut banyak terjadi dan ditemukan pada masyarakat Jawa yang mayoritas memeluk agama Islam yang magis (Chairil, 2010). Ibu dari Soekarno bernama Idayu Nyoman Rai yang lahir di Bali dengan kasta keturunan Brahmana yang dalam kasta keturunan Bali merupakan kasta Bangsawan.

Soekarno hidup di tengah kebudayaan Jawa Pewayangan, sedangkan kebudayaan Jawa membentuk perkembangan dan pertumbuhan Islam di Jawa berupa pola sinkretis puritan. sinkretis merupakan penyatuan unsur-unsur pra-Hindu atau Hindu Islam dan puritan yaitu berusaha taat pada aturan Islam. Soekarno lahir ditengah keluarga Bangsawan priyayi dan keluarga Brahmana yang luhur, hal ini menjadikan kultur dan kepercayaan Soekarno mistik

Jawa sangat mendalam, kebudayaan Jawa tersebutlah yang menjadikan perkembangan Islam di Jawa menjadi pola sinkretis puritan (Soekarno, 1965).

Soekarno memulai pendidikannya di Tulung Agung Jawa Timur, disana Soekarno kecil di Sekolah oleh Kakeknya di Sekolah Dasar atau yang dahulu disebut dengan Sekolah Rakyat (SR) Bumi Putra pada tahun 1907. Pada tahun 1908 Soekarno dipindahkan sekolah oleh ayahnya ke Sidoarjo di Sekolah Dasar HIS (*Hollandsch Inlandsche School*), kemudian pada tahun 1913 melanjutkan ke Sekolah *Europesche Legore School* di Mojokerto dan di selesaikan pada tahun 1916 (Legge, 1985). Pada umur 14 tahun ayahnya menitipkannya kepada temannya yang bernama Oemar Said Tjokroaminoto. Pada saat itu Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS (*Horgere Burger School*) di Surabaya tepatnya merupakan Sekolah Menengah Belanda. Semenjak tinggal di Surabaya, ia sering mendapatkan asuhan dan pembelajaran dari Tjokroaminoto yang kala itu seorang pemimpin partai Sarikat Islam yang kala itu sangat dihormati.

Sebagai pemimpin suatu partai, Tjokroaminoto seringkali mendapatkan tamu-tamu penting dari partai lain dan para pemimpin cabang dari Sarekat Islam, terkadang tamu-tamu dari tokoh-tokoh penting tersebut menginap, maka hal ini dijadikan kesempatan untuk mendengarkan dan mempelajari percakapan mereka terkait politik dalam negeri. Tjokroaminoto juga sering mengajak Soekarno ke pertemuan atau rapat penting, kemudian Soekarno juga sering membaca dan mempelajari buku-buku yang ada di rumah Tjokroaminoto sehingga dari sanalah ia banyak mengenal tokoh-tokoh penting di dunia seperti Jean Jacques Rousseau, Karl Max, Vladimir Lenin, Thomas Jefferson seorang ahli pidato Perancis dan lain sebagainya. Sejak belajar di HBS tersebut ia mulai mengenali teori-teori yang berbau *marxisme* dari seorang gurunya yang sosial demokrat yaitu C. Hartogh. (Chairil, Soekarno dan Perjuangan Dalam Mewujudkan Kemerdekaan (Chairil, 2010).

Selama Soekarno tinggal di Surabaya banyak sekali pelajaran dan didikan yang didapatkan dari Tjokroaminoto. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tjokroaminoto merupakan salah satu guru yang berpengaruh dalam pembentukan karakter, pemikiran, dan kepribadiannya Soekarno (Tasmadi, 1999). Soekarno sangat mengagumi seorang Tjokroaminoto yang selalu ingin belajar politik bahkan mempelajari bentuk-bentuk modern pergerakan seperti pengorganisasian massa dan pentingnya tulisan-tulisan di media massa. Selanjutnya pada usia 16 tahun Soekarno membentuk perkumpulan politik pertama yang dinamakan Tri Koro Dharmo yang berarti tiga tujuan suci yaitu sakti, budi, bakti. Perkumpulan ini dianggap sebagai simbol perlambangan dan kemerdekaan politik, ekonomi, ataupun sosial yang memiliki landasan kebangsaan serta kegiatannya dalam bidang pengembangan kebudayaan serta kegiatan kemanusiaan berupa pengumpulan dana sekolah untuk disalurkan kepada korban bencana alam terkhusus di Surabaya (Adams, Penyambung Lidah Rakyat, 1984).

Soekarno muda juga aktif di beberapa kegiatan *studirlub*, yaitu suatu kelompok yang berkumpul untuk membicarakan tentang cita-cita bangsa Indonesia dan semangat perjuangan didalam melawan penjajahan dikalangan pelajar. Disana Soekarno muda pertama kalinya berpidato dengan mengkritik ketua studirclub yang mewajibkan untuk belajar bahasa Belanda kepada generasi muda, lalu Soekarno didalam pidatonya mengkritik hal tersebut dengan berdalih bahwa tidak ada kewajiban untuk belajar bahasa Belanda mengingat lebih pentingnya dalam mempelajari bahasa Inggris yang merupakan bahasa diplomatik dan mengembangkan bahasa melayu (Yatim, 1985). Kemudian pada tahun 1921 Soekarno berhasil menyelesaikan pendidikannya di HBS serta mendapatkan banyak pelajaran dari Tjokroaminoto, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah teknik di Bandung atau *Tehnische Hooge School* yang kini bernama Institut Teknologi Bandung.

Pada masa perkuliahannya tepatnya di tahun 1922-1923 muncul ilham politik baru yang dikembangkan langsung oleh Soekarno yaitu *marhaenisme* yang menurutnya suatu dasar pergerakan. *Marhaenisme* lahir ketika Soekarno sedang berjalan-jalan di pesawahan daerah

Bandung Selatan, disana Soekarno menemukan seorang Petani yang masih terlihat muda namun hidupnya tidak mencukupi dan terbilang miskin, namun petani tersebut memiliki tanah sawah dan alat-alat untuk bertani sendiri, petani tersebut bernama Marhaen. *Marhaenisme* ini dipakai sebutan kelompok bangsa Indonesia yang mempunyai alat-alat pertaniannya sendiri namun tetap mengalami kemiskinan akibat dari penjajahan bangsa asing saat itu (Chairil, 2010). *Marhaenisme* menjadi api Semangat Nasionalisme yang ditularkan Soekarno pada masyarakat Indonesia. Ditahun yang sama pula Soekarno banyak menggaungkan tentang nasionalisme terpimpin agar membentuk kesadaran nasional lebih banyak dan membentuk masyarakat dengan persamaan hak demi menumpas sistem *feodalisme*. *Feodalisme* menurut Soekarno merupakan sesuatu yang dimiliki oleh Indonesia dimasa lalu bukan sesuatu yang dimiliki oleh Indonesia dimasa yang akan datang.

Pada tahun berikutnya yakni tahun 1927, Soekarno mengadakan perkumpulan atau rapat besar di Bandung bersama dengan keenam temannya yaitu Ishaq, Boediarto, Tilaar, Tjipto Mangunkusumo, Soejadi, dan Soedarjo untuk mendiskusikan pendirian Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai tersebut bernaftaskan *Marhaenisme* yang diiringi dengan unsur ketuhanan Yang Maha Esa, sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Feith, 1984). Usaha Soekarno untuk membuat PNI semakin maju dan dikenal sebagai partai yang cukup pesat perkembangannya di daerah Jawa bahkan luar pulau Jawa. Perkembangannya dapat terlihat ketika di pulau Jawa saja PNI sudah memiliki anggota kurang lebih sebanyak 13,5 Juta orang yang terhimpun di dalam partai ini.

Upaya besar Soekarno bersama dengan Soekiman Wirjosandjodjo seorang tokoh aktifis dari partai Sarikat Islam (SI) sebelum akhirnya berubah menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) berangkat untuk mengirimkan surat yang ditujukan kepada seluruh pengurus besar partai-partai politik di Indonesia, dimana isi surat tersebut merupakan ajakan agar seluruh partai politik untuk bersatu menjadi partai gabungan. Usaha tersebut menghasilkan respon positif sehingga berdirilah Partai Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI) (Pringgodigdo, 1991). Partai gabungan tersebut menjadikan semangat juang dalam menentang imperelialisme Belanda semakin masif. Salah satu bukti propaganda yang dilakukan yaitu terjadinya peristiwa sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 melalui kongres pelajar.

Adanya pergerakan masif tersebut, pada tahun 1929 Soekarno ditangkap oleh Belanda di Yogyakarta yang kemudian dipindahkan ke Bandung di Penjara Banceuy bersama empat pemimpin besar PNI yaitu Gatot, Maskun, Mangkurpojo, dan Supradinata. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke Sukamiskin yang kemudian pada 18 Agustus 1930 Soekarno mengeluarkan pledoinya dibacakan di depan Pengadilan Hindia Belanda yakni *Indonesia Menggugat*, akhirnya Soekarno dibebaskan pada 31 Desember 1931 (Adams, Penyambung Lidah Rakyat, 1984). Namun selama Soekarno dipenjara menjadikan PPPKI perlahan memudar karena adanya beberapa konflik kepentingan. Sehingga pada tahun 1931 Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dibangun oleh Soekarno tersebut dibubarkan oleh pengurus besar dengan alasan keselamatan bagi para anggotanya agar tidak mengalami nasib yang sama seperti Soekarno dan kawan-kawannya. Pada 18 Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (PARTINDO) yang merupakan partai pengganti dari PNI, kemudian Soekarno mendapatkan suara bulat menjadi ketua partai (Kasendra, 2010).

Perjuangan Soekarno tersebut mengalami hambatan karena harus ditangkap kembali oleh Belanda. Pada tanggal 28 Desember 1933, adanya surat keputusan pengasingan Soekarno yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu De Jonge. Soekarno diasingkan bersama Istrinya Inggit Garnaasih, Ibu Amsi mertuanya, dan Ratna Juami, dan Kartika Tinggal anak angkat Soekarno dari Surabaya menggunakan kapal barang KM Van Riebeeck menuju Ende Flores Nusa Tenggara Timur selama delapan hari dan tiba disana pada 14 Januari 1934. Soekarno berada di Ende Flores selama 4 tahun lamanya, dan disanalah cikal bakal lahirnya pikiran Soekarno tentang butir-butir Pancasila. Setelah di sana

4 tahun hingga tahun 1938 Soekarno kembali dipindahkan ke Bengkulu. Namun saat di Bengkulu, Soekarno sempat kabur ke Padang dan melarikan diri ke Jakarta pada Juli tahun 1942 (Sagimun, 1986).

## 2. *Pemikiran Falsafat Pancasila Soekarno*

Pada tahun 1942 Indonesia sempat diduduki oleh pemerintah Jepang, kemudian pada 7 september 1944 perdana menteri Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia kelak dilingkungan Asia Timur Raya. Namun pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah Jepang akhirnya membentuk *dokuritsu junbi kosakai* atau yang dikenal dengan BPUPKI (badan penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia) yang beranggotakan 62 orang diumumkan pengangkatannya pada 29 April 1945 yang dipimpin langsung oleh Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat, badan tersebut membentuk dua kali persidangan yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 yang membahas tentang bentuk negara Indonesia yang disepakati menjadi NKRI, kemudian pada sidang kedua pada tanggal 1 Juni 1945 dirumuskan terkait norma dasar negara Indonesia. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli yang membahas mengenai perumusan dasar negara yang terlebih dahulu mendengarkan pidato dari ketiga perumus dasar negara salah satunya Soekarno.

Soekarno menyampaikan usulannya pada tanggal 1 Juni 1945, bahwa lima dasar negara yaitu:

- 1) Kebangsaan Indonesia;
- 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan;
- 3) Mufakat atau Demokrasi;
- 4) Kesejahteraan Sosial; dan
- 5) Ketuhanan.

Rumusan dasar Soekarno berkorelasi dengan rumusan Pancasila yang sudah disahkan dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

**Tabel 1. Rumusan dasar Soekarno berkorelasi dengan rumusan Pancasila**

No.	Rumusan dasar Soekarno	Pancasila
1.	kebangsaan	perwujudan dari sila ke-3 Pancasila
2.	Internasionalisme/ Perikemanusiaan	perwujudan dari sila ke 2 Pancasila
3.	Mufakat/Demokrasi	perwujudan dari sila ke-4 Pancasila
4.	Kesejahteraan sosial	perwujudan dari sila ke-5 Pancasila
5.	Ketuhanan	perwujudan dari sila ke-1 Pancasila

Norma dasar atau *grundnorm* merupakan sesuatu yang sangat penting didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari norma dasar suatu negara dapat terlihat bentuk negara, corak pemerintahan, hak asasi yang dilindungi oleh negara, hak dan kewajiban negara dan lain-lain. Kemudian mengenai rumusan pemikiran Soekarno yang disebutkan pada pidatonya akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

### (1) *Kebangsaan*

Pada pidatonya yang disampaikan oleh Soekarno tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan poin kebangsaan sebagai rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya. Kata kebangsaan yang disebutkan oleh Soekarno dimaknai bahwa negara yang didirikan bukan untuk dan atas kepentingan seseorang atau dan atas kepentingan golongan tertentu seperti golongan, kaya, miskin, bangsawan, atau golongan agama tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya bahwa kata kebangsaan merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Persatuan menjadi suluh nasionalisme bangsa yang menjadi kekuatan untuk bertahan dari gelapnya penjajahan, dewasa ini semangat

kebangsaan dan persatuan masih terus dikobarkan dan menjadi kekuatan tersendiri bagi tegaknya kemerdekaan.

Persatuan merupakan suatu cita-cita luhur yang sulit direalisasikan dengan kenyataan negara Indonesia yang majemuk. Hal tersulit didalam merealisasikannya adalah proses didalam membentuk kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya persatuan dibanding kepentingan individu atau kelompok dan kesadaran akan pentingnya berbudaya. Soekarno juga menyerap dari prinsip yang ada didalam tokoh reolusi Cina yang berjudul *San Mun Chu I* yang menekankan tentang prinsip nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Soekarno sangat mengidam-idamkan kebangsaan yang berperikemanusiaan, yang tidak meremehkan bangsa lain, serta yang tidak *chauvinisme*. Soekarno menginginkan faham bangsa yang tidak dibangun berdasarkan kepentingan kelompok, ras, suku, dan agama tertentu (Soekarno, 1965). Kebangsaan yang dimaksud Soekarno bukan hanya kebangsaan yang memiliki perasaan untuk untuk bersatu saja, namun kebangsaan yang menyatukan watak atas perasaan senasib.

Dari rasa kebangsaan lahir jiwa nasionalisme bangsa yang merasakan penderitaan mendalam sehingga timbul perasaan senasib dan ingin melepaskan dari penjajahan yang sengsara. Maka dengan rasa nasionalisme Soekarno yang menggebu itu yang kemudian membawa masyarakat Indonesia kepada semangat persatuan dan dengan rasa nasionalisme Soekarno yang membawa energi positif itu yang di Ridhai Allah.

### (2) Internasionalisme atau perikemanusiaan

Internasionalisme merupakan salah satu rumusan pemikiran Soekarno dalam Pancasila yang disebutkan pada pidatonya pada 1 Juni 1945 poin kedua setelah kebangsaan. Namun pada waktu itu disebutkan sebagai Internasionalisme atau perikemanusiaan, namun pada Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini maksud usulan Soekarno bukan hanya bangsa Indonesia hendaknya membangun jiwa nasionalisme didalam negeri saja, namun juga untuk membangun kekeluargaan bangsa-bangsa. Dewasa ini disebut dengan usaha-usaha didalam menciptakan hubungan-hubungan dengan bangsa-bangsa serta ikut serta membangun perdamaian dunia. (Gatut, 2007)

Internasionalisme merupakan buah pemikiran Soekarno yang ia peroleh dari budaya bangsa Indonesia sendiri atau yang biasa disebut dengan perikemanusiaan. Sejak dahulu agama Hindu sudah mengajarkan *Tat Twam Asi* (dia adalah aku dan aku adalah dia) dikehidupan masyarakat Indonesia, yang merupakan wujud rasa saling berperikemanusiaan. Kemudian dalam ajaran agama Islam mengajarkan akan pelayanan sosial berupa *fardhu kifayah* (kewajiban yang dilakukan untuk kepentingan umum), hal tersebut biasa terjadi dikalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara kolektif atau gotong royong. Hal yang dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan pada diri seseorang. Kemudian pada agama Kristen mengajarkan tentang cinta kasih bagi sesama manusia, yang bermakna sesama manusia harus saling mengasihi dan mencintai satu sama lainnya.

Soekarno bukan menciptakan rasa kemanusiaan ditengah-tengah masyarakat Indonesia melainkan rasa tersebut tumbuh secara organik ketika sebelum adanya agama-agama ataupun sudah adanya agama-agama tersebut. Asas perikemanusiaan disini diartikan sebagai asas yang menganggap bahwa manusia berhak mendapatkan pengakuan dan dilindungi harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tidak adanya perbedaan suku, ras, kedudukan sosial, maupun agama, serta warna kulit dan lain-lain. Kematangan Soekarno sangat mantap dengan tidak mempersempit pemahaman kebangsaan pada negara sendiri saja, namun Indonesia berhak untuk menjalin hubungan dengan dunia Internasional.

### (3) Demokrasi

Rumusan pemikiran Soekarno Demokrasi atau mufakat termasuk perwujudan dari sila keempat pancasila yang sudah disahkan yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mufakat dipahami oleh Soekarno sebagai

suatu solusi yang dapat menawarkan penyelesaian masalah dengan cara membicarakan atau dimusyawarakkan. Bangsa Indonesia dikatakan sudah sejak dahulu menggunakan cara bermusyawarah agar lebih mudah didalam menyelesaikan masalah ditengah masyarakat. Negara dapat berdiri dengan tegak bilamana didalam pengelolaan pemerintahannya dapat menjamin prinsip kebebasan, kesetaraan, persaudaraan yang dapat dirasakan disemua elemen masyarakat.

Dalam hal ini bukan hanya pemenuhan hak-hak individu (*individual right*) ataupun pemenuhan hak-hak kelompok (*collective right*) saja, melainkan didalam menumbuh kembangkan jiwa solidaritas sosial berupa gotong royong demi kemaslahatan bangsa secara menyeluruh (Latif, 2011). Masyarakat Indonesia yang multikultural menjadikan cita-cita kedaulatan rakyat menjadi semangat yang berkobar pada bangsa Indonesia.

#### (4) Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan perwujudan dari sila kelima pancasila yang sudah disahkan yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno mendambakan konsep demokrasi yang dapat bersinergi sehingga memberikan dampak positif terhadap bangsa Indonesia berupa kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia tidak menginginkan negara liberal, tetapi menginginkan negara kesejahteraan yang dalam hal ini negara sosial. Dewasa ini maksud dari negara kesejahteraan yang diusul oleh para pendiri bangsa adalah negara yang pemerintahannya demokratis, yang mengedepankan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, bahwa sesungguhnya pemerintah harus menanggarkan pendapatan negara untuk dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

#### (5) Ketuhanan

Konsep ketuhanan diserap Soekarno dari kondisi masyarakat Indonesia, dan kondisi geografis, serta kondisi religius masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat agraris. Masyarakat agraris merupakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan peternakan, sedangkan pertanian sangat bergantung dengan cuaca yang diluar kuasa manusia. Maka karena keinsyafan sebagai manusia yang lemah masyarakat Indonesia sejak dahulu mempercayai akan adanya Tuhan yang maha kuasa. Maka berdoa merupakan jalan yang benar dalam menggantungkan nasib dalam memperoleh kemaslahatan.

Konsep ketuhanan oleh Soekarno disebutkan terakhir pada pidatonya 1 Juni 1945, namun dalam Pancasila konsep ketuhanan ditempatkan pada urutan pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Soekarno memiliki tujuan pada konsep ketuhanan agar bangsa Indonesia disamping merdeka tetapi juga bertakwa kepada Tuhan yang maha esa. Soekarno menjelaskan didalam pidatonya hendaknya bangsa Indonesia bertuhan dan berkebudayaan, maksudnya adalah tidak hanya bangsa Indonesia bertuhan namun setiap individu di Indonesia ber-Tuhan-Tuhannya masing-masing. Negara harus menjamin kebebasan beragama setiap warganya, sesuai dengan hak asasi manusianya.

#### 3. *Pemikiran Konsep Negara Sokarno*

Hasil pemikiran Soekarno pada perumusan konsep negara tidak terlepas dari politik kebangsaan yang telah digaungkan olehnya sebelum-sebelumnya. beberapa politik kebangsaan yang diusung oleh Soekarno sebagai pendekatan dan strategi yang dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama. Beberapa aspek utama pada politik kebangsaan Soekarno diantaranya:

##### a. *Konsep Marhaenisme Soekarno*

Marhaenisme merupakan salah satu ajaran revolusioner yang diperkenalkan oleh Soekarno guna menggalang persatuan dan kesatuan kaum marhaen. Ideologi marhaenisme pada dasarnya merupakan ajaran yang menghendaki penghapusan segala jenis pertentangan serta perbedaan yang menghasilkan ketidakadilan dan kesengsaraan pada masyarakat Indonesia. Salah satu tujuan ideologi ini yaitu agar mendorong masyarakat sejahtera dan adil

berdasarkan Pancasila. Cita-cita yang luhur dari *marhaenisme* ini yaitu agar terhapusnya kemiskinan, karena kemiskinan mengakibatkan kaum marhaen tidak mampu dan menciptakan kesengsaraan dan penderitaan yang mendalam. Maka cita-cita Soekarno dengan terhapusnya kemiskinan tersebut akan mengakibatkan terwujudnya suatu tatanan kehidupan yang lebih sejahtera serta adil dengan tidak adanya kelas sosial. Maka dengan semangat dan cita-cita tersebut dibutuhkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu berdasarkan perasaan senasib yang dirasakan. Hal inilah yang kemudian diusung oleh Soekarno pada rumusan Pancasila sebagai poin kebangsaan yang menggambarkan persatuan Indonesia.

*b. Konsep Nasionalisme Kebangsaan*

Soekarno menekankan pentingnya nasionalisme sebagai kekuatan pemersatu. Dalam konteks Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya maka nasionalisme diharapkan dapat menyatukan semua elemen masyarakat dalam satu identitas kebangsaan. Nasionalisme Soekarno bertumpu pada kesadaran kolektif bahwa setiap bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa yang satu, dimana ini memiliki tujuan agar mengatasi potensi perpecahan dan juga konflik.

Wawasan nasionalisme yang diuraikan oleh Soekarno menekankan nasionalisme sebagai pengertian kesatuan pertahanan dan ketahanan negara-bangsa. Kebangsaan harus dihayati sebagai perlindungan negara kepada ketahanan hidup manusia, bumi, lautan serta udara yang merupakan ekosistem dan tempat manusia hidup dalam wilayah teritorial Indonesia. Konsepsi tersebut yang pada akhirnya melegitimasi bahwa kedaulatan rakyat haruslah dikelola oleh negara untuk membangun kerangka politik demokrasi yang dapat menjamin kehidupan segenap bangsa Indonesia dari setiap ancaman eskternal yang menyebabkan terkikisnya kedaulatan bangsa Indonesia.

*c. Konsep Demokrasi Terpimpin*

Soekarno mengusulkan konsep demokrasi terpimpin sebagai wujud dari kesatuan dari elemen-elemen demokrasi dan kepemimpinan yang kuat. Dalam hal ini bahwa pemimpin negara memiliki peran sentral dalam memimpin dan mengarahkan kebijakan serta dalam menjaga stabilitas. Sedangkan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan dan keputusan-keputusan penting diambil dengan jalan musyawarah dan mufakat. Demokrasi terpimpin yang Soekarno konsepsikan diharapkan dapat menjadi keseimbangan baik kebebasan politik maupun efektivitas pemerintahan.

*d. Konsep nasionalisme, Islamisme, Marxisme*

Soekarno mengenalkan konsep ini sebagai tiga ideologi besar yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Soekarno melihat bahwa ketiga ideologi ini perlu disatu padukan demi membentuk kerangka politik yang bersinergis dan kuat untuk keberlangsungan Indonesia, yaitu dengan menggabungkan semangat kebangsaan, agama dan sosialisme. Soekarno berusaha untuk mengsinkretiskan ketiga ideologi ini menjadi satu ideologi yaitu nasakom. Nasakom merupakan penggabungan ketiga ideologi yang merupakan perasan dari Pancasila. Paham ini sudah pernah berkembang pada saat Soekarno muda ditahun 1926 namun dengan nama yang berbeda yaitu nasionalisme, islamisme, marxisme. Namun mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan waktu dan mengalami puncaknya pada era reformasi terpimpin. Penyatuan ketiga ideologi ini dirasa sangat penting menurut Soekarno agar menjadi suatu kekuatan yang efektif didalam melawan imperialisme dan kolonialisme penjajah.

*e. Politik merdeka bebas dan aktif*

Soekarno mengadopsi konsep politik merdeka, bebas, dan aktif. Dimana Indonesia diusulkan untuk menjaga kemandirian pada hubungan Internasional dengan tidak terikat dengan blok kekuatan manapun. Prinsip ini membentuk keinginan untuk berperan aktif dalam skala Internasional dengan tetap menjaga kebebasan pada pembuatan kebijakan luar negeri.

Beberapa politik kebangsaan yang lahir dari pemikiran-pemikiran tersebut merupakan landasan yang kemudian melatarbelakangi Soekarno untuk melahirkan rumusan dasar negara Pancasila yang disampaikan pada pidatonya pada 1 Juni 1945. Pemikiran-pemikiran Soekarno tersebut merupakan bentuk penentangan terhadap masa penjajahan untuk mengembalikan identitas dan kedaulatan negara Indonesia menjadi negara yang utuh dan satu kesatuan. Negara dan kedaulatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena kedaulatan suatu negara tidak hanya berbicara terkait wilayah saja melainkan sistem hukum yang menjadi bagian yang sama pentingnya dalam pembahasan kedaulatan. Kedaulatan merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh negara, sehingga negara wajib untuk mempertahankan kedaulatan dari setiap ancaman.

Menurut John Locke dalam karyanya *Second Treatises of Civil Government (1690)*, menjelaskan bahwa ia menentang suatu bentuk negara yang dikuasai oleh raja atau pihak lain yang membawa doktrin kekuasaan, sehingga berdampak menghilangkan kebebasan individu. Teori kedaulatan tersebut berfokus terhadap konsep kedaulatan negara yang berasal dari kedaulatan rakyat serta perjanjian sosial antar individu yang dapat menjamin hak dan kewajiban rakyat. Teori kedaulatan rakyat menurut John Locke tersebut memenuhi beberapa unsur, yaitu (Darussalam & Indra, 2021):

- 1) Kedaulatan didasarkan dengan persetujuan, Locke berpendapat bahwa negara yang sah adalah negara yang dibentuk berdasarkan kontrak sosial dan persetujuan dari rakyat. Kedaulatan bukanlah termasuk kepada sesuatu yang bersifat pemberian, melainkan sesuatu yang berdasar kepada persetujuan individu yang membentuk masyarakat.
- 2) Adanya kontrak sosial, bahwa secara individu harus menyetujui secara rasional untuk memberikan sebagian kebebasan pribadi kepada negara yang bertujuan untuk melindungi hak-hak alamiah manusia, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan sebagainya. Maka dari itu, pemerintah dapat bersifat sah karena dibentuk melalui adanya kontrak sosial.
- 3) Hak rakyat dalam mengganti pemerintahan, bahwa rakyat memiliki hak penuh untuk memberhentikan pemerintah yang melanggar kontrak sosial serta tidak memenuhi hak-hak rakyat dan tidak mewakili kepentingan rakyat
- 4) Kedaulatan terbatas, artinya kedaulatan sifatnya tidak absolut, bahwa pemerintah harus bergerak sesuai dengan hukum dan norma yang sudah disetujui rakyat yang dimana norma tersebut harus melindungi prinsip-prinsip dan hak-hak individu.
- 5) Kepentingan umum dan hak individu, bahwa suatu kedaulatan bertujuan hanya untuk kepentingan bersama yang mendatangkan kebaikan serta memastikan seluruh hak-hak individu terpenuhi.

Teori kedaulatan negara menurut John Locke tersebut berkaitan dengan pemikiran-pemikiran kebangsaan Soekarno. Politik kebangsaan yang dikeluarkan oleh Soekarno memiliki pandangan bahwa suatu kedaulatan harus digunakan oleh negara dengan mementingkan hal yang paling utama, yakni kepentingan rakyat. Dalam masa penjajahan, Soekarno banyak melakukan propaganda dalam menentang pemerintahan kolonialisme. Ciri pemikiran politik kebangsaan Soekarno yang sudah dijelaskan diatas memiliki makna utama yang meliputi:

1. Pemikiran Soekarno menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dimana hal tersebut diperjuangkan sebagai dasar mencapai negara yang merdeka. Hal tersebut tercermin dengan upaya yang dilakukannya dalam membangun sistem pemerintahan yang menampung kepentingan dan partisipasi masyarakat seperti halnya pembentukan partai
2. Soekarno memiliki corak pemikiran yaitu nasionalisme dan identitas bangsa, bahwa menurutnya suatu kedaulatan negara saling berhubungan erat dengan identitas dan kesatuan rakyat. Menurut Soekarno, bahwa suatu kemerdekaan yang telah dicapai oleh negara merupakan hasil daripada perjuangan nasional masyarakat Indonesia

untuk memperjuangkan hak-hak individu, sehingga perlu dijaga agar memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional.

3. Pemikiran politik Soekarno sangat menentang kolonialisme dan imperialisme, karena menurutnya kedaulatan suatu negara merupakan implemendasi dari kebebasan dan kemerdekaan. Hal ini dilakukan oleh Soekarno untuk melawan penjajahan asing yang mendominasi di Indonesia, karena kolonialisme yang ada pada saat itu sangat merugikan negara Indonesia dalam berbagai aspek. Sehingga dalam momentum setelah merdeka, Soekarno menjunjung semangat revolusi yang ia dorong serta mendukung penuh kebijakan luar negeri yang pro-Indonesia dan anti intervensi terhadap pihak asing.

Dalam hal ini konsep kedaulatan negara berintegrasi dengan pandangan Soekarno terkait pencetusan konsep negara dan pemikiran-pemikiran politiknya. Soekarno sangat memperjuangkan hak-hak masyarakat kelas bawah yang tertindas karena kolonialisme dan imperialisme yang terjadi, kemudian Soekarno menumbuhkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dengan pergerakan dan propagandanya terhadap penjajah, Soekarno sebagai representatif dari aspirasi bangsa Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Soekarno menjunjung tinggi dan turut menjaga kedaulatan negara agar tetap utuh dengan pergerakan dan pemikiran-pemikirannya.

## KESIMPULAN

Mengenai konsep negara dan politik kebangsaan Soekarno, menurutnya Indonesia sebagai negara yang pluralis dan multi etnis yang memerlukan norma dasar (*grundnorm*) untuk mengatur dan menjadi acuan bernegara bagi bangsa Indonesia. Sebagai seorang tokoh nasionalis bangsa yang mencetuskan lahirnya rumusan norma dasar negara Indonesia sebagaimana pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 yaitu: kebangsaan, Internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Rumusan ini yang menjadi konsep dasar negara Indonesia yang kemudian disempurnakan menjadi Pancasila. Soekarno mengembangkan konsep negara dengan berlandaskan falsafah Pancasila yang menekankan pada lima Sila. Konsep ini mencerminkan keinginan Soekarno untuk menciptakan masyarakat yang merdeka dan bersatu, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Hasil pemikiran Soekarno pada perumusan konsep negara tidak terlepas dari politik kebangsaan yang telah digaungkan oleh Soekarno sebelumnya sebagai pendekatan dan strategi yang dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama. Beberapa aspek utama pada politik kebangsaan Soekarno diantaranya: konsep *marhaenisme*, konsep nasionalisme kebangsaan, konsep demokrasi terpimpin, islamisme, marxisme, dan konsep politik merdeka bebas dan aktif. Soekarno menegaskan pentingnya nasionalisme yang inklusif dan persatuan di tengah keragaman. Ia mengadvokasi akan penerapan prinsip demokrasi yang bercorak Asia dengan penekanan pada musyawarah untuk mufakat sebagai sebuah metode didalam pengambilan keputusan politik. Soekarno juga menilai akan pentingnya ideologi dalam membangun identitas nasional yang bersinergi dan kuat serta memberikan arah bagi kemajuan bangsa.

Konsep negara dan politik kebangsaan Soekarno sudah sesuai dengan teori kedaulatan negara yang dicetuskan oleh John Locke, yang mana beberapa unsur didalam teori kedaulatan negara John Locke berintegrasi dengan pemikiran politik kebangsaan Soekarno yang memiliki pandangan bahwa suatu kedaulatan harus digunakan oleh negara dengan mementingkan hal yang paling utama, yakni kepentingan rakyat.

## REFERENSI

- Adams, C. (1984). *Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Chairil, R. (2010). *Soekarno dan Perjuangan Dalam Mewujudkan Kemerdekaan (1942-1945)*. Surabaya: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Darussalam, F. I., & Indra, A. B. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu. *Jurnal Politik Profetik Vol 9 No 2* , 189-204.
- Feith, H. (1984). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Gatut, I. S. (2007). *Pancasila Soekarno*. Yogyakarta : CV. URNA CIPTA MEDIA JAYA.
- Hasan, E. (2014). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan* . Bogor: Grafika Indonesia.
- Hasanah, U., & Budianto, A. (2020). Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Candi Vol 20 No. 2* , 32.
- Kasendra, P. (2010). *Soekarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia.
- Legge, J. (1985). *Soekarno, sebuah Geografi Politik*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode, Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Law Riview Vol. 5 No. 3*, 87.
- Nasikun. (1984). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pringgodigdo, A. K. (1991). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Dia Rakyat.
- Raeinady, V., & Dewantara, J. A. (2021). Pemikiran Soekarno Dalam Ajaran Marhaenisme. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2*, 458.
- Rahardjo, B., & Syamsuhadi. (1994). *Garuda Emas Pancasila Sakti*. Jakarta: Yapeta.
- Sagimun. (1986). *Perjuangan dan Pengasingan Pejuang Indonesia*. Jakarta: Idayu.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekarno. (1965). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tasmadi. (1999). *Tokoh-Tokoh Pemikiran Paham Kebangsaan, Ir. Soekarno dan KH. Ahmad Dahlan*. Jakarta: Dekdikbud RI.
- Yatim, B. (1985). *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*. Jakarta: Inti Aksara.